

**IMPLEMENTASI PROGRAM KALIMASADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA
(Studi di Wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)**

Naufal Hanifi Riantsani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
naufalhanifir@gmail.com

ABSTRAK

Kualitas pelayanan publik di kota Surabaya semakin membaik. Pemerintah kota terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pada pelayanan administrasi kependudukan. Pada tahun 2021 lalu pemerintah kota Surabaya meresmikan program baru khususnya pada pelayanan publik yaitu program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) guna meningkatkan kualitas pelayanan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini membahas mengenai implementasi program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) di wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pelayanan program Kalimasada di wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Teori yang dalam penelitian ini menggunakan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) sudah berjalan dengan baik, hal tersebut didasari oleh faktor keberhasilan implementasi yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan, sosial, dan politik.

Kata Kunci: *Implementasi, Pelayanan Publik, Kalimasada*

ABSTRACT

The quality of public services in the city of Surabaya is getting better. The city government continues to strive to improve services to the community, especially in population administration services. In 2021, the Surabaya city government inaugurated a new program, especially in public services, namely the Population Administration Aware Environmental Area (Kalimasada) program to improve service quality to make it more effective and efficient. This study discusses the implementation of the Population Administration Awareness Environment Area (Kalimasada) program in the Tegalsari District, Surabaya City). The purpose of this study was to determine the implementation of the Population Administration Awareness Area (Kalimasada) program and to find out the supporting and inhibiting factors in the implementation of Kalimasada program services in the

Tegalsari District, Surabaya City. The theory in this study uses the theory of the Van Meter and Van Horn implementation models. The method used is descriptive qualitative method with the approach of observation, interviews and documentation. The results of this study are that the implementation of the Population Administration Conscious Environment Area (Kalimasada) program has been going well, this is based on the success factors of implementation, namely size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes and tendencies of implementers, communication between organizations and implementing activities, and environmental, social, and political.

Keywords: *Implementation, Public Services, Kalimasada*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan dalam ensiklopedia administrasi (Westra, 1981:81) diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perseorangan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Menurut Moenir (1998:26) menyatakan bahwa hakekat pelayanan adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut pada prinsipnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang berlangsung berurutan, yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok orang, atau suatu organisasi melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka membantu menyiapkan atau memenuhi kepentingan orang lain atau masyarakat luas. Pelayanan publik dalam pelaksanaannya terjadi hubungan langsung antara warga negara dengan pemerintahan, hal itu merupakan aktifitas yang strategis. Pemerintah memiliki kewajiban penuh terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diberikan kepada semua kalangan masyarakat, dari pemerintah melalui birokrat kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakatnya. Sehingga pemerintah mempunyai kewajiban serta tanggungjawab dalam proses pelayanan mulai dari kualitas pelayanan, profesionalitas, biaya, dan kapasitas waktu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya merupakan instansi pemerintahan dibidang pelayanan publik yang melayani masyarakat dalam hal administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat diantaranya yaitu pembuatan kartu keluarga, KTP Elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan administrasi penting lainnya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pelayanan administrasi kependudukan diberbagai instansi pemerintahan dituntut untuk berinovasi guna memberikan suatu

pelayanan publik yang maksimal dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kualitas pelayanan publik di kota Surabaya semakin membaik. Pemerintah kota terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pada pelayanan administrasi kependudukan. Pada bulan November 2021 lalu pemerintah kota meresmikan program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada). Sebelum adanya program Kalimasada, dalam proses pengurusan administrasi kependudukan di Surabaya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu faktor yang menjadi kendala proses pengurusan administrasi kependudukan adalah kurang efektifitas dan efisiensi jarak bagi masyarakat yang berada di perbatasan Kota Surabaya. Dengan adanya inovasi program Kalimasada Dispendukcapil Kota Surabaya dapat membantu masyarakat agar sadar terhadap administrasi kependudukan.

Program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) merupakan salah satu program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam merintis terciptanya lingkungan/kampung yang tertib administrasi kependudukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang sadar administrasi kependudukan. Program ini dilaksanakan Ketua RT pada tiap kecamatan se-Kota Surabaya sekaligus sebagai perintis layanan administrasi kependudukan di lingkungan Rukun Tetangga guna lebih mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Pada program Kalimasada nantinya pada setiap RT yang terpilih ketua RT akan diberikan user aplikasi agar dapat membantu pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan pada program Kalimasada ialah permohonan akta kelahiran, permohonan akta kematian, pindah datang, dan pindah keluar. Salah satunya di wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dapat menerima dan membantu semua pelayanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

B. LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) menyatakan bahwa:

- a. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi secara umum merupakan istilah dari pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan

sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Nurdin Usman (2005:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Hanifah Harsono, (2006:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan menjadi tindakan kebijakan dari politik administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan (2009:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana. Sedangkan Wibawa (2008) menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.

Menurut (Grindle, 1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Model pendekatan top-down yang diformulasikan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Leo Agustino (Agustino, 2016) dengan judul *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ialah suatu abstraksi ataupun performansi dari sesuatu penerapan kebijakan yang pada dasarnya secara terencana dicoba buat mencapai kinerja implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam ikatan dengan bermacam variabel. Model ini mengandaikan jika implementasi kebijakan berjalan baik dari keputusan politik yang ada, pelaksana, serta kinerja kebijakan publik.

Terdapat 6 variabel, bagi Van Meter dan Van Horn, yang pengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

1. Dimensi serta Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan bisa diukur tingkatan keberhasilannya jika dimensi serta tujuan dari kebijakan cukup realistis dengan sosio- kultur di tingkatan pelaksana kebijakan. Jika dimensi kebijakan sangat utopis untuk dilaksanakan di tingkatan masyarakat, maka akan jauh dari kesuksesan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari keahlian menggunakan sumber daya yang ada. Manusia ialah sumber energi yang terutama dalam memastikan sesuatu keberhasilan proses implementasi. Implementasi menuntut terdapatnya sumber daya manusia yang bermutu dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang sudah diresmikan secara politik. Namun di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang butuh diperhitungkan pula yakni sumber daya finansial serta waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat atensi pada agen pelaksana meliputi organisasi resmi serta organisasi informal yang hendak ikut serta dalam pengimplementasian kebijakan publik.

Perihal ini sangat berarti sebab kinerja implementasi kebijakan (publik) dipengaruhi oleh identitas sesuai dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berupaya buat merubah sikap manusia secara radikal, hingga agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, serta ketat dalam melakukan ketentuan cocok dengan sanksi hukum yang sudah diresmikan. Tidak hanya itu, cakupan ataupun luas daerah implementasi kebijakan butuh diperhitungkan manakala hendak memastikan agen pelaksana. Terus menjadi luas cakupan implementasi kebijakan, hingga sepatutnya terus menjadi besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap ataupun Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
Sikap penerimaan ataupun penolakan dari (agen) pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan ataupun tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Perihal ini sangat bisa jadi terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan tidaklah hasil perumusan masyarakat setempat yang memahami betul perkara serta kasus yang mereka rasakan. Namun kebijakan yang hendak implementor laksanakan merupakan kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat bisa jadi para pengambil keputusan-nya tidak mengenali kebutuhan, kemauan, ataupun kasus yang masyarakat ingin selesaikan.
5. Komunikasi Antar-Organisasi serta Kegiatan Pelaksana
Koordinasi ialah mekanisme utama dalam memastikan keberhasilan penerapan kebijakan, Sehingga asumsinya kesalahan hendak sangat kecil terjadi
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, serta Politik
Perihal terakhir yang butuh pula dicermati guna memperhitungkan kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu sejauhmana lingkungan eksternal ikut mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang sudah diresmikan. Lingkungan tersebut adalah lingkungan sosial, ekonomi, serta politik. Lingkungan yang tidak kondusif bisa jadi mempengaruhi kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya buat mengimplementasikan kebijakan wajib pula mencermati keadaan lingkungan eksternal

D. HASIL DAN PENELITIAN

Pembahasan hasil penelitian merupakan hasil akhir dari melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan sebuah teori serta mendeskripsikan hasil data dan fakta yang berada di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber diatas, maka dapat di analisis melalui teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Didalam teori tersebut memiliki beberapa indikator yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan adanya implementasi program Kawasan Lingkungan Sadar Adminitrasi Kependudukan (Kalimasada) yaitu untuk mempermudah proses pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya melengkapi administrasi kependudukan. Dengan adanya program kalimasada masyarakat jika ingin

melakukan pengurusan administrasi kependudukan sudah tidak perlu datang ke kantor kelurahan. Dengan adanya program Kalimasada, masyarakat cukup mendatangi ketua RT atau ketua RW setempat untuk melakukan permohonan pengurusan dokumen. Selanjutnya ketua RT tersebut menginput data ke website Kalimasada.

Pada program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) tidak semua ketua RT yang bisa login ke website tersebut. Untuk saat ini, hanya perwakilan 1 (satu) ketua RT dari satu wilayah RW saja yang diberi user untuk login ke website Kalimasada. Namun, dari pihak kelurahan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan cara mengadakan pelayanan di balai RW pada setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, khusus pada hari Selasa setiap Kelurahan mengadakan pelayanan malam yang dilakukan pada jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam. Selain itu juga, dari pihak kelurahan selalu berkoordinasi dengan seluruh ketua RT di wilayahnya untuk mendata warga mana saja yang belum melengkapi dokumen-dokumen administrasi kependudukannya. Selanjutnya dari data tersebut pihak kelurahan didampingi oleh ketua RT setempat untuk melakukan kegiatan kunjungan ke rumah warga yang bersangkutan guna membantu proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan tersebut.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari keahlian menggunakan sumber daya yang ada. Manusia ialah sumber energi yang terutama dalam memastikan sesuatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu pelaksana suatu kebijakan. Dari mulai implementasi serta sosialisasi mengenai program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada), masyarakat selalu dilibatkan oleh pemerintah kota. Peran yang dilakukan oleh pihak kelurahan tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan terus berkoordinasi kepada ketua RT yang bersangkutan untuk membantu melayani masyarakat yang belum mengerti mengenai program Kalimasada, serta memsosialisasikan kepada seluruh warga agar dapat lebih sadar terhadap administrasi kependudukan. Program Kalimasada ini juga didukung oleh fasilitas prasarana oleh pemerintah kota supaya proses pengimplementasian program Kalimasada dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas tersebut ialah berupa satu perangkat komputer beserta alat cetak atau printer. Sangat disayangkan, fasilitas tersebut tidak diberikan kepada ketua RT yang bersangkutan, hanya saja fasilitas tersebut diberikan kepada ketua RW yang nantinya akan diletakkan di balai RW agar fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat digunakan dalam pengimplementasian program kalimasada untuk mengakses website Kalimasada guna melakukan pengimputan data ketika terdapat pelayanan program Kalimasada. Tidak hanya itu, fasilitas tersebut juga dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat lainnya.

Karakteristik Agen Pelaksana

Pada setiap pelaksana pengimplementasian program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) terdapat bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terbukti dari tanggapan masyarakat mengenai bentuk pelayanan yang diberikan pihak kelurahan dan ketua RT setempat kepada

masyarakat dalam pelaksanaan pengimplementasian program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) di wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya bahwa bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pihak kelurahan dan ketua RT setempat sangat membantu perihal masyarakat yang masih kebingungan terhadap program kalimasada ini serta dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Meskipun terdapat beberapa warga yang belum memahami proses dan prosedur dari program Kalimasada ini mereka tidak segan-segan bertanya ataupun menghubungi kelurahan atau ketua RT yang bersangkutan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Meter Van Horn, peran serta kinerja para badan pelaksana tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi program Kalimasada di wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Sikap ataupun Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana pengimplementasian kebijakan sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu kebijakan. Hal tersebut dikarenakan para pelaksana lah yang merumuskan kebijakan. Pihak kelurahan sebagai pelaksana kebijakan memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait pengurusan administrasi kependudukan agar masyarakat tidak kesulitan dalam pengurusan berkas. Masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya program Kalimasada ini segala proses pengurusan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah dan cepat serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat memuaskan.

Komunikasi Antar-Organisasi serta Kegiatan Pelaksana

Dalam berbagai program implementasi kebijakan, sebuah realitas dari program kebijakan perlu adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu dengan koordinasi dan kerjasama yang baik. Komunikasi Antar pelaksana berjalan dengan baik. Pihak Kelurahan selalu memberikan penyuluhan dan mensosialisasikan perihal program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada). Dari hasil penelitian diketahui minimnya hambatan yang dialami oleh pihak kelurahan, ketua RT/RW yang bersangkutan. Sehingga hampir tidak ada hambatan yang dialami oleh masyarakat.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, serta Politik

Kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik sangat mempengaruhi terhadap kesuksesan implementasi kebijakan, karena lingkungan itulah yang menjalani kebijakan. Suatu kebijakan itu ada karena adanya tuntutan dari lingkungan. Lingkungan, sosial, dan politik di wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya mendukung terhadap implementasi program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada). Pihak Kelurahan serta ketua RT/RW yang bersangkutan sebagai pelaksana sangat mendukung. Begitu pula dengan warga atau masyarakat. Terbukti dengan masyarakat yang antusias dengan adanya program Kalimasada tersebut dikarenakan dapat memberikan kemudahan dalam proses pengurusan administrasi kependudukan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka peneliti mendapat bahwa implementasi program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) di wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelayanan pada program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) yang dilakukan oleh pihak Kelurahan di wilayah Kecamatan Tegalsari telah dilakukan dengan baik yaitu dengan mengadakan pelayanan dibalai RW setempat serta berkoordinasi dengan ketua RT/RW setempat untuk melakukan kegiatan kunjungan guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sadar terhadap pentingnya administrasi kependudukan.
2. Terdapatnya fasilitas pendukung yang mendukung berjalannya pengimplementasian program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) sehingga proses pelayanan menjadi semakin mudah dan cepat. Namun fasilitas tersebut belum sepenuhnya merata, tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
3. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program Kalimasada. Meskipun terdapat beberapa masyarakat yang masih belum memahami dan belum sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

Saran

(Grindle, 1980; Harsono, 2006; Setiawan, 2009; Usman, 2005; Wibawa, 2008)

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bertambahnya pelayan pada program Kalimasada ditingkat RT yang awalnya hanya satu RT dalam satu RW menjadi lebih banyak sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana prosedur dan proses pelayanan program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada)
3. Menambah fasilitas pendukung sebagai sarana menunjang keberhasilan program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press.
- Harsono, H. (2006). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Grafindo Jaya.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selektta teori Administrasi Negara*. Puspagara.
- Setiawan, G. (2009). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Usman, N. (2005). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Edisi Kedu). PT. Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Rineka Cipta.
- Wibawa, S. (2008). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada.